



**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DALAM MENILAI EKONOMIS,  
EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI BERBASIS KONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA  
PEMERINTAH DESA PANGKAHWETAN, KECAMATAN UJUNG PANGKAH,  
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2020-2023**

**Nur Aini Haqiqi**

Politeknik Negeri Malang

**Sugiarto**

Politeknik Negeri Malang

**Nurafni Eltivia**

Politeknik Negeri Malang

Alamat; Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kota Malang, Jawa Timur, 65141

Korespondensi penulis: [nurainihaqiqi19@gmail.com](mailto:nurainihaqiqi19@gmail.com)

**Abstrak.** *This study analyses the financial performance of the Pangkahwetan Village Government, Ujung Pangkah Sub-district, Gresik Regency, for the 2020-2023 fiscal year using the Value for Money approach which includes economy, efficiency and effectiveness. This research uses descriptive quantitative methods through interviews and documentation based on the Village Budget Realisation Report (LRA). The results showed that the economic ratio was quite economical from 2020 to 2022 but decreased to uneconomical in 2023. budget efficiency is moderately efficient during 2020 to 2022 but becomes inefficient in 2023.. Revenue effectiveness was achieved in the early years but declines to ineffective in 2023. This study concludes that village financial management has generally reflected the principles of Value for Money, despite a significant decline in 2023. A thorough evaluation of budget absorption and programme implementation is required to improve financial performance in the future.*

**Keywords:** *Economy; Efficiency; Effectiveness; Financial Performance; Value for Money*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, tahun anggaran 2020-2023 dengan menggunakan pendekatan Value for Money yang meliputi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomi cukup ekonomis dari tahun 2020 hingga 2022 tetapi menurun menjadi tidak ekonomis pada tahun 2023. Efisiensi anggaran cukup efisien selama pada tahun 2020 sampai 2022 tetapi menjadi tidak efisien pada tahun 2023. Efektivitas pendapatan dicapai pada tahun-tahun awal tetapi menurun menjadi tidak efektif pada tahun 2023. Studi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip *Value for Money*, meskipun terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2023. Evaluasi menyeluruh terhadap penyerapan anggaran dan pelaksanaan program diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang.

**Kata Kunci:** *Ekonomis; Efisiensi; Efektifitas; Kinerja Keuangan; Value for Money*

## PENDAHULUAN

Sektor publik memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Keberadaan organisasi sektor publik harus diperhatikan dan tidak boleh dihilangkan dalam struktur suatu negara (Mahmudi, 2016:2). Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah desa memegang peranan penting sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada tata kelola anggaran yang baik, yang mencerminkan

prinsip *good governance*. Oleh karena itu, praktik akuntansi dan pengukuran kinerja keuangan di tingkat desa tidak hanya menjadi bagian administratif, tetapi juga instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik.

Praktik akuntansi yang diterapkan oleh lembaga-lembaga publik memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Proses akuntansi dan pelaporan yang dilakukan merupakan langkah krusial untuk memenuhi kebutuhan publik. Oleh karena itu, akuntansi pemerintahan harus menjadi fokus dalam perencanaan dan pengendalian anggaran di hadapan masyarakat. Selain itu, evaluasi kinerja dalam pengelolaan laporan keuangan oleh sektor publik juga sangat penting untuk memberikan informasi yang transparan mengenai aktivitas pengelolaan pemerintah, sehingga mendorong interaksi antara masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam mengelola sumber daya keuangan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan di tingkat desa. Di tengah era desentralisasi fiskal yang semakin berkembang, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat krusial. Hal ini terutama berkaitan dengan perlunya pengelolaan yang dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien, dengan mengacu pada prinsip *Value for Money* (VFM). Prinsip ini mencakup tiga aspek utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Mardiasmo, 2018:76).

Ketiga pilar ini memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap bagaimana anggaran direncanakan, digunakan, dan memberikan hasil bagi masyarakat. Aspek ekonomis menilai apakah anggaran digunakan secara hemat, efisiensi mengukur bagaimana sumber daya dimanfaatkan untuk menghasilkan output, dan efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan program. Pendekatan ini menjadi penting dalam pengelolaan Dana Desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, namun masih menghadapi tantangan dari sisi realisasi dan dampak program terhadap masyarakat.

Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan desa adalah rendahnya penyerapan anggaran dan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program. Beberapa studi sebelumnya (Hadaryen & Sugiartono, 2021) menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang ekonomis dan efisien belum tentu menjamin efektivitas, khususnya jika output program tidak berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, masih terbatas penelitian yang mengkaji kinerja keuangan desa secara spesifik menggunakan pendekatan *Value for Money* dengan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama periode waktu tertentu secara berkelanjutan.

Desa Pangkahwetan di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, merupakan salah satu desa dengan potensi pembangunan yang tinggi, termasuk program kerja seperti pengembangan UMKM dan kawasan wisata yaitu Muara Bengawan Solo (MBS). Namun, pelaksanaan berbagai program tersebut membutuhkan evaluasi kinerja yang objektif untuk memastikan bahwa dana desa yang digunakan benar-benar memberikan manfaat optimal dan sesuai prinsip VFM. *Gap* dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang menganalisis kinerja keuangan desa ini berdasarkan data LRA multi-tahun, khususnya tahun 2020–2023 yang mencerminkan dinamika sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Pangkahwetan menggunakan pendekatan *Value for Money*, yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 hingga 2023. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem pengelolaan keuangan desa serta menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan fiskal di tingkat lokal.

## KAJIAN TEORI

Pertama, **Kinerja keuangan** adalah salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur seberapa baik suatu organisasi, baik swasta maupun organisasi sektor publik, dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Kinerja ini mencerminkan tingkat efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan, yang sangat penting bagi terciptanya tata kelola organisasi yang baik (*good governance*). Evaluasi terhadap kinerja keuangan dapat dilakukan melalui berbagai indikator kuantitatif maupun kualitatif, seperti rasio keuangan, tingkat realisasi anggaran terhadap rencana, serta tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan dan output yang dihasilkan.

Kedua, **Pengukuran kinerja keuangan** merupakan sebuah proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu entitas telah mencapai tujuan keuangannya. Kinerja keuangan dapat dinilai melalui indikator-indikator tertentu yang mencerminkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya finansial. Menurut (Bastian, 2010:120) evaluasi terhadap kinerja keuangan merupakan elemen penting dalam mekanisme akuntabilitas publik, yang berfungsi untuk menilai sejauh mana penggunaan dana publik telah memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Dalam konteks pemerintahan desa, pengukuran kinerja keuangan mencakup berbagai indikator, seperti pendapatan dan belanja desa, yang diukur untuk melihat apakah dana yang tersedia telah digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Manfaat utama pengukuran kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, mendorong efisiensi, dan memberikan informasi kinerja sebagai dasar evaluasi kebijakan publik (Mahsun, 2006:45). Pengukuran kinerja keuangan mendorong akuntabilitas publik dengan menunjukkan bagaimana anggaran digunakan dan apa saja hasilnya. Hal ini juga memberikan tekanan positif bagi pemerintah untuk mengelola keuangan dengan lebih bertanggung jawab dan efisien.

Ketiga, **Value for Money** adalah suatu konsep dalam pengelolaan sektor publik yang menekankan pentingnya tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya publik (Bastian, 2010:232). Konsep ini bertujuan untuk menghindari pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa tujuan yang direncanakan dapat tercapai dengan sumber daya yang ada. Dalam pengelolaan keuangan desa, VFM membantu memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Value for money merupakan pendekatan dalam pengelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya mampu menghasilkan output dan outcome terbaik melalui prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (Halim, A., & Kusufi, 2012:84)

Keempat, **Konsep Value for Money (VFM)** menilai sejauh mana program desa menghasilkan manfaat maksimal melalui tiga pilar utama yaitu prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

### 1. Ekonomi

Prinsip ekonomi menekankan penggunaan dana secara hemat tanpa mengurangi kualitas. Pemerintah desa perlu merencanakan anggaran secara tepat dan memilih metode pengadaan yang paling efisien biaya. Menurut Mardiasmo (2018:165), ekonomi berarti memperoleh barang atau jasa berkualitas dengan harga terbaik.

Kinerja keuangan dapat dikatakan ekonomis jika rasio yang dicapai lebih dari seratus persen. Semakin besar persentase rasionya maka kinerja pemerintah dapat dikatakan semakin baik.

2. Efisiensi

Efisiensi menilai kemampuan desa menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil maksimal. Kinerja dikatakan efisien bila input menghasilkan output optimal, tanpa pemborosan.

Hasil yang dicapai dikatakan efisien apabila kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja pemerintah dapat dikatakan semakin baik.

3. Efektifitas

Efektifitas menunjukkan sejauh mana tujuan program tercapai sesuai rencana. Pemerintah desa harus menetapkan indikator yang jelas dan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan program berdampak positif bagi masyarakat. Mardiasmo (2018:166) menyebut Mardiasmo (2018:166) menyebut efektifitas sebagai pencapaian target dengan hasil guna.

Hasil rasio dikategorikan efektif apabila persentase yang dicapai dapat mencapai seratus persen. Semakin tinggi hasil

persentase efektifitas maka kemampuan pemerintah dapat dikatakan semakin baik.

Dengan mengintegrasikan ketiga pilar ini (ekonomis, efisiensi, dan efektifitas) dalam pengelolaan dana desa, diharapkan pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Kelima, **Anggaran sektor publik** adalah perencanaan program kerja yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka-angka yang menggambarkan kegiatan atau program-program kerja yang akan dilakukan pemerintah untuk periode tertentu Anggaran tidak hanya sebagai alat untuk perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai cerminan kebijakan dan prioritas pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan pelayanan publik.

Keenam, **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)** adalah dokumen rencana keuangan tahunan desa yang menjadi dasar pengelolaan keuangan desa. APBDes mencerminkan pendapatan yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran. Menurut Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun (2018), APBDes adalah "rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa."

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Pangkahwetan selama tahun anggaran 2020 hingga 2023 berdasarkan konsep Value for Money, yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan perangkat desa untuk memahami kendala dan kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan anggaran. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020–2023, dokumen perencanaan, dan pelaksanaan APBDes. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menghitung rasio kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, yang kemudian dibandingkan dengan standar kriteria.

Interpretasi data kuantitatif diperkuat dengan hasil wawancara untuk memperoleh pemahaman kontekstual terhadap capaian kinerja keuangan desa. Untuk mekanisme urutan analisis adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data dari objek penelitian yaitu laporan realisasi anggaran dana desa.
2. Mengidentifikasi rincian data yang ada dalam laporan realisasi anggaran.
3. Melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *value for money* yaitu pengukuran rasio efektivitas dan efisiensi pada total anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja desa.

**a. Ekonomis**

$$Ekonomis = \left( \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \right) \times 100\%$$

Ketentuan :

- 1) Apabila >100% maka hasil dikatakan ekonomis.
- 2) Apabila 85% - 100% maka hasil dikatakan cukup ekonomis/ekonomis berimbang.
- 3) Apabila 65% - 84% maka hasil dikatakan.
- 4) Apabila <65% maka dikatakan tidak ekonomis.

**b. Efisiensi**

$$Efisiensi = \left( \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \right) \times 100\%$$

Ketentuan :

- 1) Apabila >100% maka hasil dikatakan tidak efisien.
- 2) Apabila =100% maka hasil dikatakan cukup efisien/tepat guna.
- 3) Apabila 90-99%, maka hasil dikatakan efisien.
- 4) Apabila <90% maka hasil dikatakan sangat efisien.

**c. Efektivitas**

$$Efektivitas = \left( \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \right) \times 100\%$$

Ketentuan :

- 1) Apabila >100% maka hasil dikatakan efektif.
  - 2) Apabila 85% - 99% maka hasil dikatakan cukup efektif.
  - 3) Apabila 65% - 84% maka hasil dikatakan kurang efektif.
  - 4) Apabila <65% maka tidak efektif.
4. Menganalisis hasil dari tingkatan rasio yang diperoleh dari perhitungan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, yaitu rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk dapat menilai kinerja keuangan.
  5. Menarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Pangkahwetan berdasarkan pendekatan Value for Money yang meliputi tiga indikator utama: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Analisis dilakukan terhadap data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020 hingga 2023, yang kemudian dibandingkan dengan standar rasio menurut Mahmudi (2015). Penjelasan berikut disusun secara naratif dan analitis untuk memberikan gambaran menyeluruh atas capaian kinerja keuangan desa.

**Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkahwetan Tahun 2020-2023**

	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Total Anggaran Pendapatan	Rp2.383.786.000,00	Rp3.607.091.000,00	Rp6.687.076.000,00	Rp6.038.683.000,00
Total Realisasi Pendapatan	Rp2.461.719.448,84	Rp3.584.070.967,54	Rp6.628.964.800,45	Rp3.425.883.660,00
Total Anggaran Belanja	Rp2.353.131.762,95	Rp3.692.898.672,66	Rp6.757.226.903,91	Rp6.548.356.994,28
Total Realisasi Belanja	Rp2.345.257.538,63	Rp3.550.012.736,31	Rp6.159.441.710,08	Rp3.786.342.962,47

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Desa Pangkahwetan

### 1. Rasio Ekonomis

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Ekonomis	Kriteria
2020	Rp2.353.131.762,95	Rp2.345.257.538,63	99,67%	Cukup Ekonomis
2021	Rp3.692.898.672,66	Rp3.550.012.736,31	96,13%	Cukup Ekonomis
2022	Rp6.757.226.903,91	Rp6.159.441.710,08	91,15%	Cukup Ekonomis
2023	Rp6.548.356.994,28	Rp3.786.342.962,47	57,82%	Tidak Ekonomis

Sumber: Data diolah, 2025

Rasio ekonomis mencerminkan tingkat efisiensi biaya dalam merealisasikan anggaran belanja. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2022, rasio berada dalam kategori cukup ekonomis hingga ekonomis, yaitu 99,67% (2020), 96,13% (2021), dan 91,15% (2022). Artinya, pemerintah desa mampu merealisasikan anggaran dengan belanja yang relatif terkendali, menunjukkan manajemen keuangan yang hemat dan efisien.

Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan tajam menjadi 57,82%, yang masuk dalam kategori tidak ekonomis. Penurunan drastis ini bukan disebabkan oleh pemborosan anggaran, melainkan oleh tidak terealisasinya bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten, sebagaimana disampaikan dalam hasil wawancara dengan perangkat desa. Bantuan keuangan yang sedianya berjumlah lebih dari Rp2,5 miliar gagal dicairkan, sehingga berbagai kegiatan penting seperti pembangunan jalan desa, sarana olahraga, dan rehabilitasi kantor desa tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, hanya sebagian kecil dari total anggaran belanja yang benar-benar dieksekusi.

Secara manajerial, kondisi ini menunjukkan adanya kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah desa memilih untuk tidak memaksakan pelaksanaan kegiatan tanpa dukungan dana kas yang tersedia, sebagai bentuk kehati-hatian dan akuntabilitas. Namun demikian, penurunan rasio secara signifikan tetap mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran belum sepenuhnya adaptif terhadap risiko fiskal, khususnya terhadap ketidakpastian sumber pendanaan eksternal.

## 2. Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi	Kriteria
2020	Rp2.461.719.448,84	Rp2.345.257.538,63	95,27%	Efisien
2021	Rp3.584.070.967,54	Rp3.550.012.736,31	99,05%	Efisien
2022	Rp6.628.964.800,45	Rp6.159.441.710,08	92,92%	Efisien
2023	Rp3.425.883.660,00	Rp3.786.342.962,47	110,52%	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah, 2025

Rasio efisiensi menggambarkan seberapa optimal dana desa digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Pada tahun 2020 hingga 2022, rasio efisiensi tercatat pada angka 95,27%, 93,63%, dan 92,92%, yang termasuk dalam kategori efisien menurut standar Mahmudi (2015). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pembiayaan yang seimbang dan tidak melebihi kapasitas pendapatan desa. Efisiensi yang tinggi selama tiga tahun ini mencerminkan adanya konsistensi dalam pengendalian belanja dan penyesuaian terhadap kondisi keuangan desa secara umum.

Pada tahun 2023, rasio efisiensi meningkat menjadi 110,52%. Angka ini menunjukkan bahwa pengeluaran desa melampaui pendapatan yang diterima, sehingga menimbulkan defisit. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar kekurangan pendapatan ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Selain itu, beberapa kegiatan prioritas telah terlanjur direncanakan dan dijalankan di awal tahun sebelum ada kepastian pencairan dana dari pihak provinsi dan kabupaten. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sinkronisasi antara waktu pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan.

Secara manajerial, pemerintah desa memerlukan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel namun tetap berbasis pada prinsip kehati-hatian, agar pengeluaran tidak melebihi kemampuan fiskal aktual. Penerapan mekanisme cash planning dan kontrol pelaksanaan kegiatan berbasis realisasi pendapatan sangat diperlukan untuk menjaga efisiensi ke depan.

## 3. Rasio Efektifitas

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektifitas	Kriteria
2020	Rp2.461.719.448,84	Rp2.383.786.000,00	103,27%	Efektif
2021	Rp3.584.070.967,54	Rp3.607.091.000,00	99,36%	Cukup Efektif
2022	Rp6.628.964.800,45	Rp6.687.076.000,00	99,13%	Cukup Efektif
2023	Rp3.425.883.660,00	Rp6.038.683.000,00	56,73%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2025

Rasio efektivitas mengukur seberapa besar pendapatan desa berhasil direalisasikan dari target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan menunjukkan efektivitas yang sangat baik pada tahun 2020 (103,27%) serta cukup efektif pada tahun 2021 (99,36%) dan 2022 (99,13%). Ini menunjukkan bahwa target pendapatan disusun secara realistis dan sebagian besar sumber pendanaan benar-benar dapat dicapai, termasuk Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan pendapatan lainnya.

Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan tajam dalam rasio efektivitas menjadi hanya 56,73%, yang tergolong tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara, penurunan ini disebabkan oleh ketergantungan pada bantuan keuangan dari luar desa yang tidak terealisasi, padahal bantuan tersebut telah dimasukkan dalam target pendapatan. Kesalahan dalam menyusun target yang terlalu optimis menjadi penyebab utama rasio ini menurun secara drastis.

Secara manajerial, hal ini menunjukkan bahwa penyusunan APBDes belum mempertimbangkan pola realisasi pendapatan sebelumnya secara memadai. Pemerintah desa perlu mengadopsi pendekatan berbasis data historis dan menghindari asumsi pendapatan yang belum pasti. Diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan potensi PAD melalui BUMDes juga menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Pangkahwetan tahun anggaran 2020 hingga 2023 menggunakan pendekatan *Value for Money*, dapat disimpulkan bahwa kinerja selama tiga tahun pertama (2020–2022) tergolong cukup baik, dengan capaian yang ekonomis, efisien, dan efektif. Rasio ekonomis menunjukkan bahwa belanja dilakukan secara terkendali; efisiensi menunjukkan optimalisasi penggunaan dana; dan efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target pendapatan. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan pada ketiga indikator. Rendahnya serapan anggaran, belanja yang melebihi pendapatan, serta tidak tercapainya target pendapatan menandakan ketidakseimbangan antara perencanaan dan realisasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat bergantung pada ketepatan dalam menyusun anggaran berbasis realisasi serta kemampuan desa dalam mengantisipasi risiko fiskal, terutama terkait ketergantungan pada dana transfer. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan akuntabilitas fiskal melalui perencanaan yang realistis, monitoring berkala, dan pengembangan sumber pendapatan lokal untuk mendukung keberlanjutan pembangunan desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jdih Bpk.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.